

TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

**(Studi Empiris di Kabupaten
Nabire Provinsi Papua)**



Dr. Janviter Manalu, M.Si.



**Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis
Kearifan Lokal**
(Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua)

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

(Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua)

Dr. Janviter Manalu, M.Si.



Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

(Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua)

Penulis:

Dr. Janviter Manalu, M.Si.

Editor:

Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si

Layouter :

Tim PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : November 2021

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 18,2 x 25,7 cm
ISBN : 978-623-448-159-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua)

Buku dengan judul Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua) sesuai dengan yang ditargetkan. Buku dengan judul Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Empiris di Kabupaten Nabire Provinsi Papua) merupakan hasil penelitian tentang transformasi ekonomi yang dilakukan secara terpadu pada kabupaten di Nabire Provinsi Papua. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2021, Penulis

DAFTAR ISI

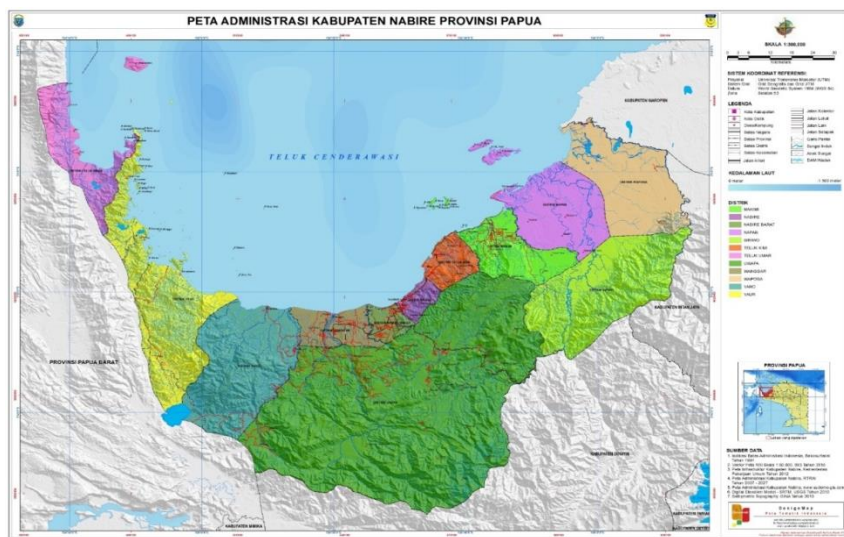
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR PENTINGNYA TRANSPORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) DI KABUPATEN NABIRE	1
BAB II KONSEP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI P ENGEMBANGAN KAMPUNG TERPADU.....	4
A. Pengertian Lingkungan Hidup	4
B. Konsep Pengembangan Kampung.....	5
C. Proses Pemecahan Masalah	6
BAB III GAMBARAN UMUM PENDAPATAN DAN ASET RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT, TERMASUK URUSAN EKONOMI, TINGKAT PENDAPATAN, DAN GIZI KELUARGA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	10
A. Pendapatan dan Aset Rumah Tangga	10
B. Urusan Ekonomi.....	12
C. Pendapatan Responden Per Tahun Pada Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	13
D. Kepemilikan Aset Rumah Tangga.....	15
E. Gizi Keluarga.....	18
BAB IV KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KONDISI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN	22
A. Kapasitas Sumber Daya Manusia	22
B. Aspek Sosial.....	24
C. Aspek Pendidikan	28
D. Demografi.....	32
BAB V KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	38
A. Produktivitas Pertanian.....	38
B. Ketahanan Pangan	46
C. Ketersediaan/Aksesibilitas Air Bersih	50
BAB VI PENDEKATAN GESI KEGIATAN PEMUDA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN ADAT DAN BUDAYA SETEMPAT	53
BAB VII PENDEKATAN GESI KEGIATAN PEMUDA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN ADAT DAN BUDAYA SETEMPAT	59
A. Kelembagaan, Faktor Eksternal Dan Politik; (Organisasi Perdesaan, Keterlibatan Organisasi Desa Dalam Menciptakan Lapangan Kerja, Perusahaan Desa, Prukades, Bumdes).....	59

B. Jumlah Desa Yang Telah Melaksanakan RPJMD Partisipatif (Perwakilan Masyarakat), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Dan APB (Rencana Belanja Desa) Desa Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Desa.....	61
BAB VIII FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA.....	
	71
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	71
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Transformasi Ekonomi	74
C. Analisis lainnya (Kontekstual)	78
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

Pengantar Pentingnya Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Di Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua yang memiliki luas wilayah sekitar 12.075 km² atau 16,70 persen dari luas Provinsi Papua. Jika dilihat berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Nabire terletak pada koordinat 134°35' – 136°33' Bujur Timur dan 2° 25' – 3°56' Lintang Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di punggung Pulau Irian dengan ibu kota di Kota Nabire.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Nabire

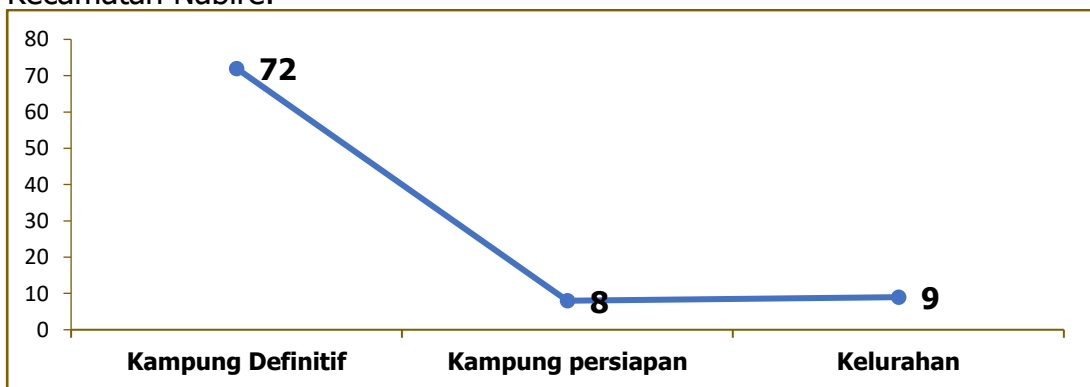
Kabupaten Nabire terdiri dari 15 kecamatan. Luas kecamatan terbesar tertelak di Kecamatan Uwapa dengan luas wilayah sebesar 1808.96 km² atau 14.98 persen terhadap luas Kabupaten Nabire, sedangkan Kecamatan Dipa menjadi kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Nabire dengan luas sekitar 79 km² terhadap luas Kabupaten Nabire.

Tabel 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Nabire

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ² /sq.km)	Presentase terhadap luas kabupaten (%)
Uwapa	1.808.96	14.98
Makimi	1.416.41	11.73
Menou	838.63	6.95
Siriwo	1009	8.36
Wapoga	611	5.06
Yaur	246	2.04
Dipa	79	0.65
Yaro	127	1.05
Teluk Umar	178	1.47
Kepulauan Moora	468	3.88
Napan	1421	11.77
Wanggar	1040	8.61
Teluk Kimi	602	4.99
Nabire	1400	11.59
Nabire Barat	830	6.87
Total	12.075	100

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, 2021.

Kabupaten Nabire memiliki 89 Kampung dan kelurahan yang tersebar di setiap kecamatan. Sebanyak 72 Kampung *definitive* tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nabire. Sebanyak 8 kampung persiapan berada di kecamatan uwapa (1 kampung persiapan), Kecamatan Menou (2 kampung persiapan), Kecamatan Nabire (1 kampung persiapan) dan Kecamatan Yaro (1 kampung persiapan), sedangkan, 9 kelurahan di Kecamatan Nabire.



Gambar 2 Jumlah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Nabire

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, 2021.

Jika dilihat berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Nabire didominasi oleh dataran rendah yang memiliki ketinggian wilayah <299 mpdl. Kabupaten Nabire yang tergolong kedalam dataran rendah yaitu Kecamatan Uwapa (91 mpdl), Kecamatan Yaur (6 mpdl), Kecamatan Teluk Umar (14 mpdl), Kecamatan Wanggar (10 mpdl), Kecamatan Nabire Barat (6 mpdl), Kecamatan Nabire (8 mpdl) Kecamatan Teluk Kimi (7 mpdl). Kecamatan di Kabupaten Nabire yang termasuk kedalam dataran tinggi dengan ketinggian wilayah > 700 mpdl adalah Kecamatan Menou, Dipa, dan Siriwo.

Keadaan iklim di Kabupaten Nabire dipengaruhi oleh letak astronomis dan letak geografis. Kabupaten Nabire memiliki kelembaban yang tinggi, suhu udara yang setiap hari berubah-ubah sepanjang tahun, serta musim hujan yang dipengaruhi oleh musim barat, timur dan selatan. Pada umumnya suhu dan kelembaban udara di Kabupaten Nabire cenderung tinggi. Hal ini terlihat pada keadaan temperatur suhu udara rata-rata pertahunnya mencapai 27⁰C dengan suhu udara minimum rata-rata 24⁰C dan suhu udara maksimum rata-rata mencapai 32⁰C. kelembaban udara rata-rata mencapai 80-82 mm/tahun dengan tekanan udara 1.008 mm/tahun.

BAB II

Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Kampung Terpadu

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan berdasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai :

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, N.H.T, 2004). Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: (1) Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Arianto (2008: 21) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Di atas lingkungan hidup inilah manusia berusaha mencapai dan meningkatkan kemakmuran.

B. Konsep Pengembangan Kampung

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya kampung dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara *bottom up*. Dimana kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta badan permusyawaratan kampung (BPK) sebagai legislatif kampung. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan kampung yang dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan mekanisme seperti ini, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kampung seharusnya bersifat *bottom up*. Akan tetapi selama ini, baik perencanaan maupun implementasi pembangunan kampung selalu bersifat *top down*, dimana kampung hanya menerima program-program pembangunan dari pemerintah. Berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang ada, seharusnya kampung memiliki *grand design* pembangunan sendiri (inisiatif kampung), jika kampung memiliki *grand design* dalam pembangunan kampungnya, maka kampung dimungkinkan hanya akan mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. sedangkan inisiatif untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan datang dari inisiatif kampung sendiri.

Lebih lanjut, dalam pengajuan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh kampung kepada pemerintah, terdapat klasifikasi program, misalnya untuk pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, kampung dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya untuk membangun sekolah, pasar kampung, listrik, air, dan sebagainya. Disisi lain, kampung dimungkinkan juga untuk dapat melakukan riset aset - aset potensi sumberdaya dan bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya terkait dengan kondisi tanah atau lahan yang produktif dan yang tidak produktif.

Hingga, semua pengajuan program pembangunan kampung muncul dari inisiatif berdasarkan pada kondisi eksisting dan tata ruang kampung, dengan demikian, pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten/kota) seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas asset-aset sumber daya di kampung agar mampu merencanakan pembangunan kampungnya, sehingga pemerintah pusat hanya melakukan pembiayaan berbagai program pembangunan yang diajukan oleh kampung, permasalahan tersebut selalu terjadi karena kampung sendiri tidak memiliki konsep dalam merancang pembangunan kampung dan pemerintah juga tidak memahami akan eksistensi pembangunan kampung

berdasarkan keunikan dan kekhasan kampung dengan memaksakan berbagai programnya.

Griapon (2015) pola penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Jayapura terdiri atas 4 tahapan yaitu:

- a. Tahap Perencanaan: Pada tahap ini sebelum tim perencanaan membuat dokumen perencanaan yang memuat survey sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat, perkiraan harga tanah dan dampak lingkungan serta dampak sosial di buat pihak yang membutuhkan tanah terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana program pembangunan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat adat tanpa terkecuali.
- b. Tahap Persiapan: Tim perencanaan menyerahkan dokumen perencanaan kepada petinggi-petinggi adat. Setelah dokumen perencanaan diserahkan, tim persiapan bersama-sama dengan petinggi-petinggi adat dan masyarakat pemilik tanah melakukan konsultasi publik, pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah dan penetapan lokasi pembangunan.
- c. Tahap Pelaksanaan: Setelah pengumuman lokasi pembangunan, instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilampiri dokumen perencanaan pengadaan tanah diserahkan kepada Iram/Trang selaku petinggi adat dan kepala BPN (Kantor Pertanahan).
- d. Tahap Penyerahan Hasil: Setelah proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan, instansi yang memerlukan tanah bersama-sama Iram/Trang dan Petinggi-petinggi adat melakukan proses pelepasan secara hukum adat yang ditandai dengan surat pelepasan adat.

C. Proses Pemecahan Masalah

TEKAD ini adalah: data mengenai 1). Pendidikan, 2). Kesehatan, 3). Perumahan dan aset, 4). Jenis usaha yang dilakukan, 5). Pengolahan dan akses pasar, 6). Layanan keuangan, 7). Pola makan dan menu, 8). Keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim, 9). pemberdayaan perempuan dalam pertanian spesifik, 10). perusahaan pedesaan, 11). dana desa dan pendapat desa, dan 12). Penyusunan RPJM kampung/desa di Kabupaten Dogiyai

Cara pengumpulan data dalam kegiatan ini adalah menggunakan kuesioner, dengan teknik wawancara langsung kepada setiap responden, responden yang menjadi obyek wawancara adalah: Kepala desa, wakil perempuan, wakil pemuda, penduduk asli, non asli, grup minoritas. Kelompok sasaran terdiri dari rumah tangga petani kecil, pengusaha mikro dan rumah

tangga di desa Pesisir yang terlibat dalam penangkapan ikan dan produksi hasil laut Kelompok sasaran terdiri dari rumah tangga petani miskin, pengusaha kecil / usaha rumah tangga dan rumah tangga miskin di Pesisir. desa yang terlibat dalam penangkapan ikan dan produksi makanan laut.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Literatur;
2. Mengumpulkan data kuantitatif / kualitatif dari bidang sasaran sesuai dengan metodologi penelitian yang ditetapkan;
3. Data kualitatif atau kuantitatif:
4. Pengumpulan data di lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data kuantitatif
 - Data kuantitatif diperoleh dengan modul instrumen survei terstruktur, dalam kegiatan survei dasar akan digunakan beberapa modul, antara lain: (i). Perumahan dan barang rumah tangga; (ii). Produksi dan sumber daya alam meliputi: Informasi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan darat dan perikanan tangkap), (iii). Proses Pasar dan akses; (iv). Jasa keuangan, (v). Kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim, (vi). Bisnis pedesaan, (vii). Khusus untuk Pro Weai, (viii). Organisasi produsen, (ix). Pengumpulan dana desa dan ADD, dimana data primer diperoleh secara langsung dengan observasi atau wawancara langsung dengan pihak terkait sebagai objek penelitian;
 - Data primer disertai dengan risalah atau risalah yang ditandatangani oleh lembaga yang dikunjungi dan disertai dengan foto atau dokumentasi film;

Tanggung jawab perwakilan universitas meliputi:

- Rancang / sesuaikan / filter kuesioner untuk memastikan kuesioner yang disesuaikan dengan situasi lokal dan cukup untuk mengumpulkan data dasar tentang indikator yang dipilih. Versi terbaru questionnaire dengan MOV juga jelas.
- Format / tata letak questionnaire, pastikan semua template jelas dan kode semua pertanyaan.
- Mempersiapkan adalah dokumentasi pendukung, termasuk panduan pengkodean, wawancara dan pengawas untuk manual

dan manual entri data .. juga mengirimkan salinan kertas dan elektronik dari semua dokumen ke MOV.

b. Data kualitatif

Mungkin perlu untuk melengkapi data kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dengan metode kualitatif dan partisipatif seperti wawancara terbuka dan semi-terstruktur dengan informan kunci, observasi langsung atau partisipan, diskusi kelompok, survei komunitas, klasifikasi kekayaan, jalur transek dan pemetaan kelembagaan. Fleksibilitas metode ini memungkinkan triangulasi data, pemeriksaan silang, dan analisis di lokasi. Data kualitatif memungkinkan penyelidikan mendalam atas masalah, kasus atau peristiwa yang dipilih dan memberikan informasi penting tentang prospek penerima manfaat, dinamika reformasi tertentu, atau alasan di balik hasil yang diamati dalam analisis kuantitatif.

Informasi dapat diperoleh berdasarkan:

- Diskusi
Pertemuan kelompok untuk membahas sejumlah masalah dan mencatat serta membuat kesimpulan.
- Wawancara (menggunakan kuesioner)
Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang terkait langsung dengan program, responden berhak memberikan data dan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yaitu: (1). Rumah tangga desa; (2) Petani, nelayan dan kelompok tani olahan, koperasi, BUM desa, kelompok perempuan, karang taruna, dsb di wilayah binaan / contoh; (3) lurah desa / kelurahan sasaran; dan (4) Lembaga keuangan desa (bank daerah, bank umum, bank swasta, dll.)
- Pengumpulan data sekunder dari pemerintah daerah
Pengumpulan data sekunder harus up to date atau data terbaru. Data sekunder yang diperlukan adalah;
 - a. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berlanjut tahun ini dan 2 tahun sebelumnya;
 - b. Rencana strategis (renstra) berlanjut tahun ini dan 2 tahun sebelumnya;
 - c. Renja (rencana kerja) SKPD dilanjutkan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya.

Kegiatan lapangan terdiri dari:

- a. Persiapan kegiatan lapangan: (i) Rekrutmen coordinator dan enumerator; (ii) Mempersiapkan atau mencetak kuesioner sesuai kebutuhan, (iii) mempersiapkan administrasi lain seperti (surat misi, perlengkapan lapangan, dll).
- b. Pelatihan coordinator dan simpatisan; (SAYA). Jelaskan pedoman implementasi; (ii) Praktek pengumpulan data. Memperkenalkan dan mempraktikkan validasi data, pembersihan data, entri data. (iv). Administrasi diperlukan.
- c. Penyajian lokasi desa dan penggandaan informasi pada semua data yang diperlukan sebelum pengumpulan data. pada khususnya (rumah tangga miskin, kepala desa, lembaga ekonomi desa, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, laki-laki dan perempuan muda), produktivitas pertanian, kegiatan pertanian, dll.
- d. Bekerja sama dengan desa dan masyarakat, menetapkan kategorisasi tujuan referensi, khususnya untuk penentuan sampel utama.
- e. Kumpulkan atau kumpulkan data (wawancara mendalam semi-terstruktur, diskusi kelompok, dll.)
- f. Kontrol kualitas pemulihan data.

BAB III

Gambaran Umum Pendapatan dan Aset Rumah Tangga Dan Masyarakat, Termasuk Urusan Ekonomi, Tingkat Pendapatan, dan Gizi Keluarga Kabupaten Kepulauan Yapen

A. Pendapatan dan Aset Rumah Tangga

Pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Nabire berdasarkan harga berlaku secara umum mengalami peningkatan setiap tahun sepanjang periode 2015-2019. Tahun 2015, nilai PDRB Kabupaten Nabire sebesar 7,7 miliar rupiah dan terus meningkat hingga 2019 sebesar 11,09 miliar rupiah. Berikut ini nilai PDRB di Kabupaten Nabire atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2015-2019.

Tabel 2 PDRB Kabupaten Nabire atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2016-2019

	Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 381,61	1 518,98	1 588,29	1 723,25	1 830,69
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1 733,45	1 826,01	1 940,88	2 018,28	2 097,80
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	114,02	127,09	143,47	154,36	161,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,99	6,24	7,27	8,25	9,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3,60	3,77	3,84	3,98	4,01
F	Konstruksi/Construction	917,12	1 063,73	1 227,86	1 372,81	1 488,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 248,28	1 449,95	1 688,28	1 904,83	2 078,01
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	461,16	524,58	589,45	654,41	727,98

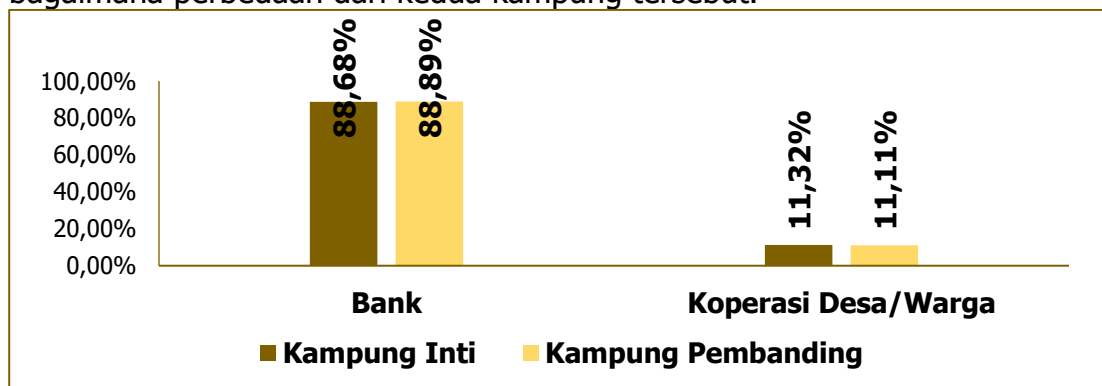
Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018*	2019**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	37,49	42,76	49,07	54,46	60,83
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	218,36	247,69	274,80	297,20	321,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	151,71	167,96	180,09	204,46	225,94
L	Real Estat/Real Estate Activities	238,20	268,15	301,69	335,17	377,51
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	83,42	91,52	99,25	109,98	119,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	772,02	894,51	959,16	1 030,01	1 058,77
P	Jasa Pendidikan/Education	143,53	162,51	182,16	199,76	223,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	109,81	123,24	138,35	154,22	173,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	88,27	98,45	110,08	124,47	141,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	151,71	167,96	180,09	204,46	225,94
L	Real Estat/Real Estate Activities	238,20	268,15	301,69	335,17	377,51
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		7 707,04	8 617,13	9 484,00	10 349,89	11 099,38

Sumber: BPS Kab Nabire, 2016-2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi sumbangan PDRB tertinggi sepanjang tahun 2015-2019, di tahun 2019 nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.097,80 miliar rupiah, yang disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.078,01 miliar rupiah dan berikutnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1.830,69 miliar rupiah

B. Urusan Ekonomi

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sektor keuangan juga sangat berperan penting dalam percepatan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunannya dihadapkan pada permasalahan dalam keterbatasan modal untuk membiayai investasi pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan secara mandiri dan tidak tergantung dari bantuan luar negeri. Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam pembentukan jumlah uang beredar sebagai sumber dana pembangunan. Semakin besar jumlah uang beredar akan mendorong dan meningkatkan *financial depening*, yaitu penghimpunan dana pembangunan yang bersumber dari sektor keuangan. Berikut data yang menunjukkan fasilitas dan bentuk layanan keuangan yang digunakan masyarakat Kabupaten Nabire tahun 2021. Penelitian ini membandingkan dua jenis kampung yang berada di Kabupaten Nabire, pertama kampung inti atau kampung yang telah merasakan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah, dan kampung pembanding atau kampung yang belum pernah merasakan program pemberdayaan masyarakat. Dapat dilihat dari hasil survei bagaimana perbedaan dari kedua kampung tersebut.

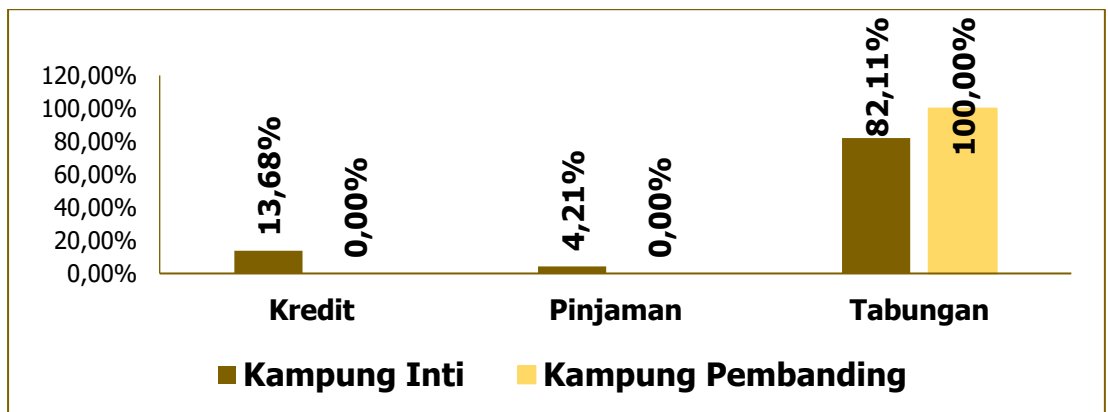


Gambar 3 Fasilitas Layanan Keuangan Yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Nabire 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Hasil survei diatas menunjukkan bahwa sebanyak 88,68 persen masyarakat kampung inti menggunakan bank untuk melakukan simpan pinjam, kredit, dan tabungan. 11,32 persen lainnya menggunakan koperasi desa/warga. Jika dibandingkan dengan kampung pembanding, masyarakat yang menggunakan bank sedikit lebih banyak dari kampung inti sebesar 88,89 persen, namun kurang sedikit dari masyarakat yang

menggunakan koperasi desa/warga sebesar 11,11 persen. Untuk bentuk layanan yang digunakan masyarakat di Kabupaten Nabire ialah kredit, pinjaman, dan tabungan, berikut datanya.



Gambar 4 Bentuk Layanan Keuangan Yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Nabire 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat kampung inti Kabupaten Nabire yang mempunyai tabungan sebanyak 82,11 persen, 13,68 persen memiliki kredit dan 4,21 persen menggunakan pinjaman. Sedangkan untuk kampung pemanding, 100 persen masyarakatnya hanya menggunakan uangnya untuk ditabung.

Tinggi rendahnya perputaran uang di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga atau keluarga. Menurut Suparyanto (2014) pendapatan rumah tangga (keluarga) adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Subandi (2001 dalam Made Gunarsih, dkk 2013), pendapatan rumah tangga diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari seluruh anggota yang bekerja baik dari pertanian maupun dari luar pertanian.

C. Pendapatan Responden Per Tahun Pada Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Menurut Rochaeni (2014) Pertanian merupakan penunjang dalam kesejahteraan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Saat ini produksi pangan menjadi permasalahan karena tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan usaha untuk meningkatkan

produksi pertanian dalam menjawab permasalahan krisis pangan. Berikut ini informasi terkait pendapatan responden per tahun sektor pertanian di Kabupaten Nabire.

Tabel 3 Pendapatan Responden Per Tahun Pada Sektor Pertanian (juta rupiah)

Jenis Tanaman	Kampung Inti	Kampung Pemanding
Tanaman Holtikultura	49.166.303	22.156.231
Tanaman Pangan	30.450.000	17.993.123
Tanaman Perkebunan	11.250.000	4.200.000

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Berdasarkan hasil survei diatas, pendapatan responden terbanyak dihasilkan dari jenis tanaman holtikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Kampung inti menghasilkan pendapatan dari tanaman holtikultura sebesar Rp.49.166.303 juta per tahun per responden sedangkan kampung pemanding hanya sebesar Rp 22.156.231 juta per tahun per responden. Terlihat dari data tersebut, pemerintah perlu lebih memberikan bantuan atau program pemberdayaan pertanian khususnya pada kampung pemanding seperti sosialisasi dan penyuluhan sehingga usaha pertanian di kampung pemanding lebih meningkat dan kesejahteraan di Kabupaten Nabire dapat menyuluruh. Berikut data pendapatan responden per tahun pada sektor peternakan.

Tabel 4 Pendapatan Responden Per Tahun Pada Sektor Peternakan (juta rupiah)

Jenis Ternak	Kampung Inti	Kampung Pemanding
Unggas	14.972.619	13.290.000
Ruminansia	67.695.333	61.762.500

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Hasil survei diatas menunjukkan bahwa pendapatan responden terbanyak di Kabupaten Nabire adalah dari jenis ruminansia seperti sapi, kambing dll. Kampung inti menghasilkan pendapatan dari hewan jenis ruminansia sebesar Rp 67.695.333 juta per tahun sementara kampung pemanding sebesar Rp 61.762.500 juta per tahun. Dari angka tersebut terlihat bahwa pendapatan masyarakat dari sektor peternakan lebih tinggi dari sektor pertanian, oleh karena itu pemerintah dapat lebih memanfaatkan potensi ternak hewan di Kabupaten Nabire, seperti menjadikan nya hasil olahan seperti nugget, sosis, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan pendapatan masyarakat Kabupaten

Nabire dapat meningkat. Informasi terkait pendapatan responden pada sektor perikanan dapat dilihat pada data dibawah ini.

Tabel 5 Pendapatan Responden Per Tahun Pada Sektor Perikanan (juta rupiah)

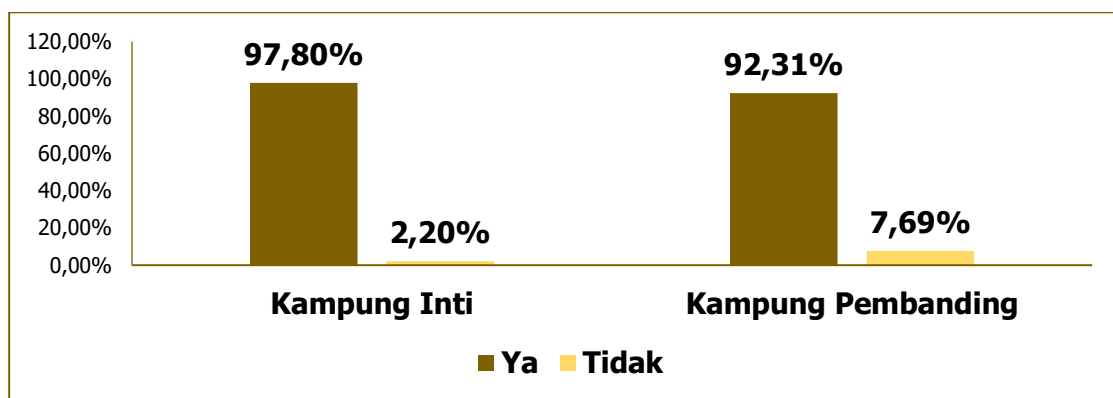
Jenis Ikan	Kampung Inti	Kampung Pemandang
Pelagis Besar	111.360.000	-
Pelagis Kecil	55.314.286	23.040.000

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Data survei diatas menunjukkan bahwa jenis ikan yang menghasilkan pendapatan terbanyak untuk responden di kampung inti adalah jenis ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol, dan lain-lain sebesar Rp 111.360.000 per tahun per responden. Sementara di kampung pemandang tidak ditemukan responden yang melaut dengan hasil tangkapan ikan pelagis besar, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kapasitas perahu/kapal yang memadai untuk menangkap ikan-ikan berukuran besar. Sementara di kampung inti, sudah ada kapal yang berukuran besar sehingga nelayan dapat menangkap ikan dengan hasil yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, perlu nya dorongan dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana atau program pemberdayaan masyarakat nelayan di kampung pemandang sehingga kesejahteraan nelayan di Kabupaten Nabire dapat meningkat.

D. Kepemilikan Aset Rumah Tangga

Aset dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat diukur dalam satuan uang. Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kepemilikan aset oleh rumah tangga akan mempengaruhi akses pasar yang dapat dilakukan oleh rumah tangga. Menurut Sahdan (dalam Nasir dkk, 2008), kepemilikan aset diartikan sebagai kepemilikan alat-alat produktif oleh suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. Berikut persentase kepemilikan aset rumah tangga Kabupaten Nabire tahun 2021.



Gambar 5 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Aset di Kabupaten Nabire 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase aset rumah tangga Kabupaten Nabire tahun 2021, jika dibandingkan dengan kampung pemandang, persentase kepemilikan aset di kampung inti lebih tinggi sebesar 97,80 persen atau hamper 100 persen masyarakatnya memiliki aset rumah tangga, dan 2,20 persen nya tidak memiliki aset. Jumlah tersebut dapat lebih unggul dari kampung pemandang karena pengaruh keterlibatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berikut ini jenis aset rumah tangga apa saja yang dimiliki di Kabupaten Nabire.

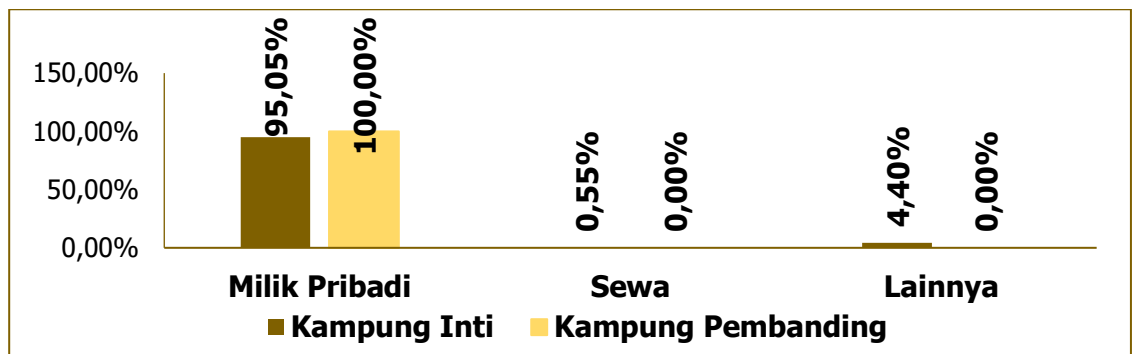
Tabel 6 Jenis Aset Rumah Tangga Yang Dimiliki Oleh Responden

Aset Yang Dimiliki Rumah Tangga	Kampung Inti		Kampung Pemandang	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Meja	75,27%	24,73%	70,77%	29,23%
Kursi Tidak Berlapis	70,33%	29,67%	64,62%	35,38%
Kursi Berlapis Kain, Sofa	19,78%	80,22%	23,08%	76,92%
Meja Kopi	21,98%	78,02%	23,08%	76,92%
Lemari Pakaian, Laci, Meja, Meja Samping, Rak Buku	76,37%	23,63%	52,31%	47,69%
Tempat Tidur	71,98%	28,02%	40,00%	60,00%
Kipas Angin	56,04%	43,96%	32,31%	67,69%
Lentera (Parafin)	4,95%	95,05%	20,00%	80,00%
Jam	56,04%	43,96%	33,85%	66,15%
Mesin Jahit	5,49%	94,51%	3,08%	96,92%
Besi Untuk Pakian	13,19%	86,81%	16,92%	83,08%
Kulkas/Freezer	39,01%	60,99%	23,08%	76,92%
Kompore Arang	15,93%	84,07%	20,00%	80,00%

Aset Yang Dimiliki Rumah Tangga	Kampung Inti		Kampung Pemanding	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Kompor Minyak Tanah/Parafin	69,78%	30,22%	29,23%	70,77%
Kompor Listrik/Gas	2,75%	97,25%	3,08%	96,92%
Radio	13,74%	86,26%	23,08%	76,92%
Kaset/CD/Pemutar Audio	28,57%	71,43%	61,54%	38,46%
Tv/Vcr/Pemutar Dvd	65,93%	34,07%	69,23%	30,77%
Antena Satelit	26,92%	73,08%	32,31%	67,69%
Panel Surya	1,10%	98,90%	9,23%	90,77%
Generator	3,30%	96,70%	1,54%	98,46%
Smart Phone	27,47%	72,53%	29,23%	70,77%
Ponsel	67,58%	32,42%	56,92%	43,08%
Peralatan Dan Aksesoris Komputer	8,24%	91,76%	9,23%	90,77%
Perhiasan Dan Arloji	2,75%	97,25%	0,00%	100,00%
Sepeda	17,03%	82,97%	10,77%	89,23%
Sepeda Motor/Skuter	76,92%	23,08%	13,85%	86,15%
Kendaraan Bermotor	23,63%	76,37%	16,92%	83,08%
Perahu	7,14%	92,86%	46,15%	53,85%
Parang	17,58%	82,42%	32,31%	67,69%
Skop	11,54%	88,46%	24,62%	75,38%
Linggis	9,89%	90,11%	27,69%	72,31%
Alat Tukang	4,95%	95,05%	30,77%	69,23%

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

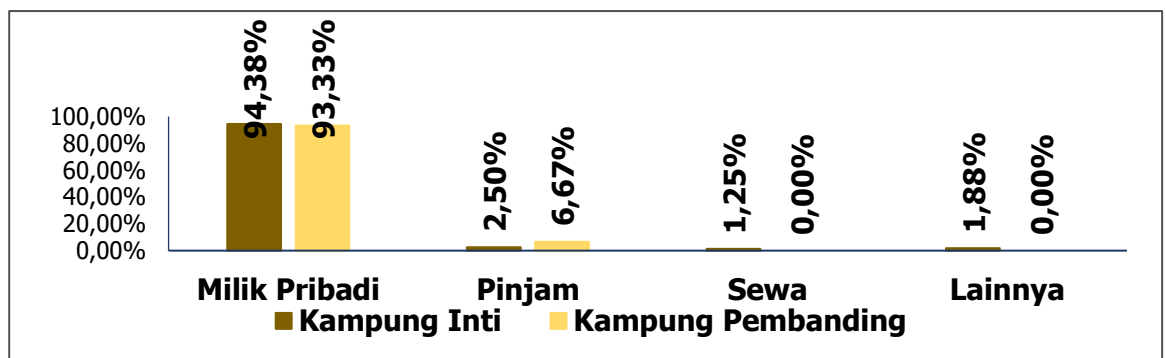
Hasil survei diatas menunjukkan bahwa, sepeda motor ialah jenis aset yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat kampung inti sebesar 76,92 persen, jika dibandingkan dengan kampung pemanding kepemilikan sepeda motor hanya sebesar 13,85 persen. Jenis aset terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat kampung pemanding ialah meja sebesar 70,77 persen. Untuk jenis aset yang paling sedikit dimiliki di kampung inti ialah aset panel surya yaitu 1,1 persen, sedangkan di kampung pemanding ialah perhiasan dan arloji yaitu 0 persen masyarakat di kampung pemanding tidak ada yang memiliki perhiasan dan arloji. Untuk status kepemilikan rumah dan lahan masyarakat Kabupaten Nabire dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 6 Status Kepemilikan Rumah Responden Tahun 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Hasil grafik diatas menunjukkan bahwa masyarakat di kampung inti yang memiliki rumah pribadi sebanyak 95,05 persen, dan 0,05 persen masyarakat nya menyewa rumah. Sedangkan kampung pemandang 100 persen atau seluruh masyarakat nya memiliki rumah pribadi.



Gambar 7 Status Kepemilikan Lahan Oleh Responden

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Untuk status kepemilikan lahan, masyarakat Kabupaten Nabire yang memiliki lahan milik pribadi sebanyak 94,38 persen lebih tinggi sedikit dari kampung pemandang. 2,5 persen lahan pinjam, dan 1,2 persen nya lahan sewa.

E. Gizi Keluarga

Salah satu persoalan kesehatan yang mengandung cukup perhatian yaitu seputar status gizi masyarakat khususnya keluarga. Masalah gizi adalah masalah yang dihadapi hamper seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua yang masih memiliki masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Masalah kemiskinan menyebabkan berkurangnya

kuantitas dan kualitas makanan yang tersedia seringkali dianggap sebagai penyebab utama kurang gizi.

Mengonsumsi makanan yang sehat bagi keluarga harus memenuhi prinsip gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah cukup. Selain itu, penerapan gizi seimbang dalam keluarga dapat diterapkan dengan cara mengonsumsi makanan yang beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan kegiatan fisik dan mempertahankan serta memantau berat badan yang seimbang. Berikut data yang menunjukkan persentase tingkat konsumsi rumah tangga yang memiliki gizi.

Tabel 7 Tingkat Konsumsi Gizi Rumah Tangga Di Kabupaten Nabire Tahun 2021 (%)

Konsumsi Keluarga	Kampung Inti		Kampung Pembanding	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Setiap makanan yang terbuat dari sereal dan akar putih atau umbi atau pisang raja, seperti: Kentang putih, ubi putih, singkong / singkong / yucca, cocoyam, talas atau makanan lainnya berdasarkan akar atau umbi pisang atau umbi putih.	93,96%	6,04%	98,46%	1,54%
Semua kacang atau kacang polong seperti: Kacang atau kacang polong (biji segar atau kering), lentil atau produk kacang / kacang, termasuk hummus, tahu dan tempe	79,12%	20,88%	81,54%	18,46 %
Semua kacang atau biji, seperti: Kacang, kacang / kacang tanah atau biji tertentu atau "mentega" dari kacang / biji atau pasta	74,18%	25,82%	66,15%	33,85 %
Setiap susu atau produk susu, seperti: Susu, keju, yogurt, atau produk susu lainnya, tidak termasuk mentega, es krim, krim atau krim asam	57,69%	42,31%	46,15%	53,85 %
Semua produk daging, unggas dan ikan, seperti: Daging hati, ginjal, jantung atau organ lain atau makanan berbasis darah, termasuk permainan liar. Daging sapi, babi, domba, kambing, kelinci, binatang buruan, ayam, bebek, burung-burung lain. Ikan segar atau kering, krustasea atau makanan laut	90,66%	9,34%	96,92%	3,08%
Semua telur: Telur unggas atau burung lain	82,42%	17,58%	49,23%	50,77 %
Semua sayuran berdaun hijau gelap, seperti: Contoh sayuran berdaun hijau	84,07%	15,93%	87,69%	12,31 %

Konsumsi Keluarga	Kampung Inti		Kampung Pemanding	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
sedang sampai gelap, termasuk daun liar / hijauan yang tersedia di wilayah tersebut.				
Semua buah-buahan, sayuran dan akar kaya akan vitamin A: Labu, wortel, labu atau ubi jalar yang berwarna kuning atau oranye, Mangga matang, pepaya matang, dll	86,26%	13,74%	96,92%	3,08%

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Terlihat dari hasil survei diatas bahwa masyarakat kampung inti paling banyak mengonsumsi makanan yang terbuat dari sereal dan akar putih atau umbi atau pisang raja sebanyak 93,96 persen. Konsumsi kedua terbanyak adalah produk-produk daging, unggas dan ikan sebanyak 90,66 persen, dan paling sedikit adalah produk susu seperti susu, keju, dan yoghurt sebanyak 57,69 persen. Untuk kampung pemanding konsumsi tertinggi nya sama seperti kampung inti ialah makanan yang terbuat dari sereal dan akar putih atau umbi atau pisang raja sebanyak 98,46 persen, lebih tinggi sedikit dari kampung inti dan konsumsi paling sedikit ialah produk susu seperti susu, keju, dan yoghurt sebanyak 46,15 persen.

Berbicara mengenai gizi keluarga tidak lepas dari gizi balita khususnya dibawah usia 5 (lima) tahun. Prevalensi status gizi balita perlu dipandang sebagai tantangan pembangunan karena menentukan nasib generasi masa depan. Potret gambaran status gizi di Kabupaten Nabire dapat dicerminkan dari prevalensi gizi buruk dan gizi kurang (*underweight*) pada anak usia dibawah lima tahun atau balita prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak usia dibawah dua tahun atau baduta, prevalensi kurus dan sangat kurus (*wasting*), serta pemberian ASI eksklusif.

Gizi buruk erat kaitannya dengan kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu lama akibat supan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi kurang baik, diantaranya pemahaman mengenai makanan aman dan sehat untuk dimakan, penyakit menular, lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pola asuh. WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat di suatu negara, provinsi atau kabupaten berdasarkan tingkat *underweight*, *stunting* dan *wasting* seperti tertera di tabel berikut ini.

Tabel 8 Klasifikasi WHO Tentang Masalah Kesehatan Masyarakat Untuk Prevalensi Kurang Gizi

Klasifikasi	Underweight	Stunting	Wasting
Rendah	<10 %	<20 %	<5 % (baik)
Sedang	10-19 %	20-29 %	5-9 % (kurang baik)
Tinggi	20-29 %	30-39 %	10-14 % (buruk)
Sangat tinggi	≥30 %	≥40 %	≥15 % (sangat buruk)

Sumber: WHO, 2000

Pada FSVA Papua 2015, data underweight dan stunting disajikan pada Tabel, namun disepakati hanya data stunting yang digunakan pada indikator Ketahanan Pangan Komposit dan pemetaan. Hal ini untuk memfasilitasi perbandingan dengan program-program pemerintah serta untuk memantau pengurangan angka stunting, dimana secara global stunting dipertimbangkan sebagai satu-satunya masalah gizi terpenting di Indonesia dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, di tahun 2020 balita yang menderita stunting di Kabupaten Nabire hanya sebanyak 2 persen atau 300 dari 15.147 balita dibawah 5 tahun. Hal ini merupakan kerja keras dari program pemerintah provinsi maupun daerah untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Nabire